

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN PONOROGO**

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

<https://ponorogokab.bps.go.id>

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN PONOROGO**

2016



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PONOROGO 2016

Katalog BPS : 4102004.3502
No Publikasi : 35020.1727
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : vi + 68

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Diterbitkan oleh :
@Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dicetak oleh :
CV. Azka Putra Pratama

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

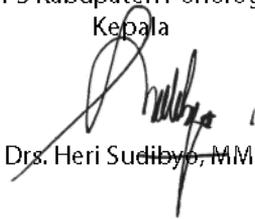
Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2016” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Ponorogo, Desember 2017
BPS Kabupaten Ponorogo
Kepala



Drs. Heri Sudibyo, MM.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Kependudukan	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan rasio Jenis kelamin	2
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan	6
1.4 Penggunaan Alat Kontrasepsi	8
2. Kesehatan	11
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	12
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi balita	16
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	18
3. Pendidikan	21
3.1 Angka Buta Huruf	22
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	24
3.3 Tingkat Pendidikan	25
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	26
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan	28
4. Ketenagakerjaan	31
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	32
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	34
4.3 Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan	34
4.4 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	36
4.5. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih	38

5.	Taraf dan Pola Konsumsi	41
	5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	41
	5.2 Konsumsi Energi dan Protein	46
6.	Perumahan dan Lingkungan	49
	6.1 Kualitas Rumah Tangga	50
	6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	52
	6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	53
7.	Kemiskinan	55
	7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo	56
	7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	57
8.	Sosial Lainnya	59
	8.1 Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan	59
	8.2 Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan	61
	8.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	62
	8.4 Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Jaminan Sosial	64
	8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	67



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

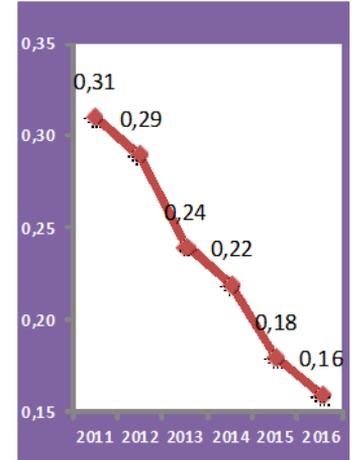
Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata menjadi masalah serius yang harus dihadapi.

1.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 2016, dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo menduduki peringkat dua puluh dua jumlah penduduk terbanyak. Sementara jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 tercatat sebanyak 868,81 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 1,4 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 yang mencapai 867,39 ribu jiwa. Sementara bila dibandingkan dengan enam tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo saat ini mengalami peningkatan sekitar 1,42 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 856,68 ribu jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu enam tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo telah mengalami penambahan penduduk sebesar 12,13 ribu jiwa.

Gambar 1.1.
Tingkat Pertumbuhan
Penduduk Kab. Ponorogo,
Tahun 2011-2016



Sumber : *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2011-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	859,30	0,31	99,66
2012	861,81	0,29	99,71
2013	863,89	0,24	99,74
2014	865,81	0,22	99,85
2015	867,39	0,18	99,91
2016	868,81	0,16	99,95

Sumber : *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 tercatat sebesar 0,16 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 0,31 persen dan terus mengalami penurunan ditahun-tahun selanjutnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 sebesar 99,95. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ponorogo seimbang jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan kondisi dari tahun ke tahun sejak 2011 terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo cenderung meningkat setiap tahunnya. Semakin berkembangnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan khususnya pesantren baik yang berkelas nasional maupun internasional dengan mengkhususkan untuk mendidik santri laki-laki mengakibatkan arus migrasi masuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo semakin seimbang.

Pada tingkat kecamatan di Kabupaten Ponorogo, wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo (77.182 orang) atau 8,88 persen dari total penduduk Kabupaten Ponorogo. Sementara wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Pudak dengan jumlah penduduk hanya 9.465 orang atau 1,09 persen dari total penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016.

1.2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

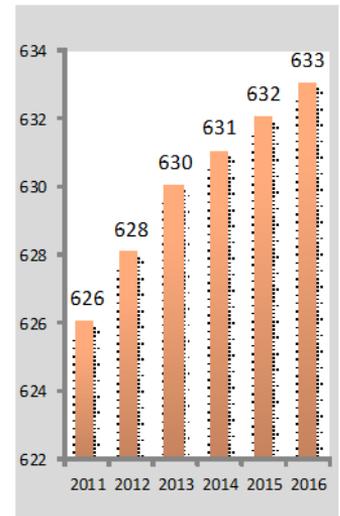
Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kabupaten Ponorogo yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2011 kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 626 jiwa per km², tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 628 jiwa per km², selanjutnya pada tahun 2013 sekitar 630 jiwa per km², dan tahun 2014 sekitar 631 jiwa per km² serta tahun 2015 sekitar 632 jiwa per km². Sedangkan pada tahun 2016 kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 633 jiwa per km².

Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten/kota yang berada di eks Karesidenan Madiun pada tahun 2016 hampir seluruhnya berada di bawah 1.000 jiwa per km² kecuali Kota Madiun yang mencapai 5.284 jiwa per km² sekaligus sebagai wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Selanjutnya diikuti Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun dengan masing-masing kepadatan

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ponorogo, Tahun 2011 - 2016



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

penduduk sekitar 912 jiwa per km² dan 671 jiwa per km². Kemudian disusul Kabupaten Ngawi sekitar 640 jiwa per km², Kabupaten Ponorogo sekitar 633 jiwa per km² dan Kabupaten Pacitan sekitar 397 per km².

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk, Eks Karesidenan Madiun Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (per km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pacitan	552,30	1.389,87	397
Ponorogo	868,81	1.371,78	633
Madiun	678,00	1.010,86	671
Magetan	628,00	688,85	912
Ngawi	829,50	1.295,98	640
Kota Madiun	175,60	33,23	5.284

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Bila dilihat dari kecamatan, di Kabupaten Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi penduduk di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada umumnya kepadatan penduduk yang tinggi berada di perkotaan. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ponorogo sekitar 3.460 jiwa per km², kedua adalah Kecamatan Babadan sekitar 1.501 jiwa per km². Selanjutnya disusul Kecamatan Jetis sekitar 1.294 jiwa per km², Kecamatan Siman sekitar 1.135 jiwa per km², dan Kecamatan Kauman sekitar 1.067 jiwa per km². Adapun kecamatan yang kepadatannya di bawah 500 jiwa per km² yaitu Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Puduk, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sampung, dan Kecamatan Ngebel.

1.3. Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2011-2016 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 angka beban tanggungan Kabupaten Ponorogo sebesar 47,04 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif. Pada tahun 2012 angka beban tanggungan penduduk masih stabil 47,04 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 47,05 persen. Besaran angka beban ketergantungan sebesar 47,05 persen terus berlanjut hingga tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 47,06 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Meningkatnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebagai dampak dari meningkatnya angka harapan hidup. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada sebanyak 10,94 persen penduduk yang

berusia tua (65 tahun ke atas) dan naik menjadi 10,95 persen pada tahun 2012 dan 2013. Tahun 2014 proporsi penduduk usia tua meningkat lagi mencapai 10,96 persen. Hingga tahun 2015 dan 2016 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas terus naik menjadi 10,97 persen.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Ponorogo, Tahun 2011-2016

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	21,05	68,01	10,94	47,04
2012	21,04	68,01	10,95	47,04
2013	21,04	68,01	10,95	47,05
2014	21,04	68,00	10,96	47,05
2015	21,03	68,00	10,97	47,05
2016	21,03	68,00	10,97	47,06

Sumber : *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*

Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 68,01 persen pada tahun 2011-2013 dan kemudian menurun pada tahun 2014-2016 menjadi sebesar 68,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Ponorogo menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) juga semakin menurun dari 21,05 persen pada tahun 2011 menjadi 21,04 persen pada tahun 2012-2014 dan 21,03 persen pada tahun 2015-2016.

1.4 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Keluarga Berencana selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaannya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015-2016, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 52,60 persen pada tahun 2015 dan 55,71 persen pada tahun 2016. Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, alat kontrasepsi suntikan dan AKDR/IUD/Spiral yang paling banyak diminati di Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2015 penggunaan suntikan mencapai 45,44 persen dan meningkat menjadi 46,84 persen pada tahun 2016. Sementara itu, penggunaan AKDR/IUD/Spiral justru mengalami penurunan dari 29,43 persen pada tahun 2015 menjadi 25,24 persen pada tahun 2016.

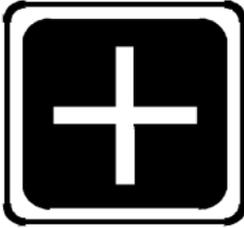
Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2015 dan 2016

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	6,99	7,70
MOP/Vasektomi	0,36	1,37
AKDR/IUD/Spiral	29,43	25,24
Suntikan	45,44	46,84
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	5,29	8,64
Pil	9,20	7,32
Kondom/Karet	1,00	1,11
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,00	0,00
Cara Tradisional	2,29	1,79
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	52,60	55,71

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Selain alat kontrasepsi suntikan dan AKDR/IUD/Spiral, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah Pil, MOW/Tubektomi, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan cara Tradisional. Pada tahun 2015 penggunaan Pil mencapai 9,20 persen, namun menurun menjadi 7,32 persen di tahun 2016. Sementara pemakaian MOW/Tubektomi tahun 2015 sebesar 6,99 persen dan meningkat menjadi sebesar 7,70 persen pada tahun 2016. Penggunaan Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit juga mengalami peningkatan dari 5,29 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 8,64 pada tahun 2016. Penurunan pemakaian pada beberapa alat kontrasepsi kemungkinan disebabkan peserta KB mengganti/beralih ke jenis alat kontrasepsi yang lain.

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah MOP/vasektomi, dan kondom/karet, masing-masing persentasenya pada tahun 2016 1,37 persen (MOP/vasektomi) dan 1,11 persen. Hal ini diduga karena sosialisasi informasi masih kurang optimal sehingga banyak penduduk yang masih takut memilih alat kontrasepsi ini.



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) dan usia harapan hidup.

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan angka 1000 (seribu) dikurangi angka kematian bayi. Sementara Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, terutama di sektor kesehatan.

Angka kelangsungan hidup bayi dapat dilihat dari data kematian Per 1000 kelahiran hidup hasil estimasi yang diperbaiki memiliki besaran sekitar 978,45 pada tahun 2016. Data tersebut memberikan makna bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terdapat 978 bayi yang mencapai usia 1 tahun. Sementara angka kematian bayi dari tahun ke tahun diproyeksikan menurun dari 24,34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 21,55 Per 1.000 kelahiran hidup atau 2,2 persen pada tahun 2016. Dengan demikian angka kelangsungan hidup bayi berbanding terbalik dengan angka kematian bayi. Semakin rendah angka kematian bayi, maka semakin besar peluang kelangsungan hidup bayi.

**Tabel 2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 – 2016**

No.	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	24,34	23,48	22,85	22,21	21,55
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	975,66	976,52	977,15	977,79	978,45

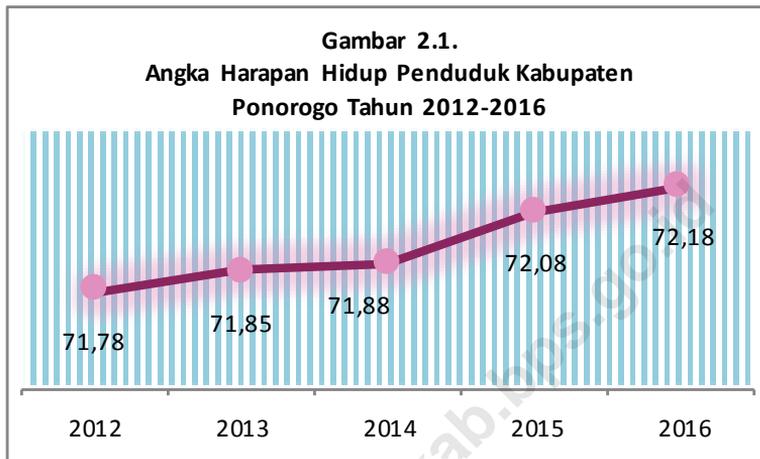
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Angka Estimasi diperbaiki

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Setiap tahunnya diseluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis, dan komplikasi berat lahir rendah (Depkes RI, 2008).

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

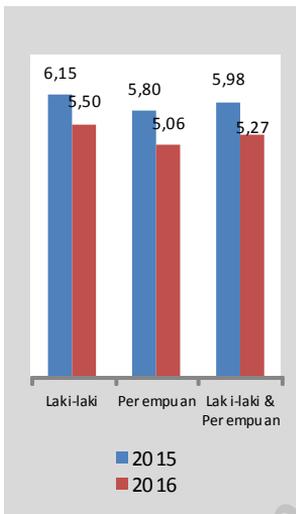
Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir (2012 – 2016) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 71,78 pada tahun 2012 menjadi 72,18 pada tahun 2016.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi.

Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 15,01 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 14,49 persen.

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

Gambar 2.2
Rata-rata Lama Sakit
(Hari), Tahun 2015-2016



Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata lama Sakit
Tahun 2015 – 2016

Indikator	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Angka Kesakitan (%)	14,49	15,01
Rata-rata Lama Sakit (hari)	5,98	5,27

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Hasil Susenas tahun 2015 dan 2016 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari. Terjadi penurunan angka kesakitan pada tahun 2016 (5,27 hari) dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,98 hari. Bila rata-rata lama sakit dirinci menurut jenis kelamin ternyata rata-rata lama hari sakit penduduk laki-laki lebih lama (5,5 hari) dibanding penduduk perempuan (5,06 hari) pada tahun 2016. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 2.3 Persentase Anak Usia 0 - 23 Bulan yang pernah disusui dan Lamanya disusui di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2015 – 2016

Jenis Kelamin	Anak Usia 0-23 bulan yang pernah disusui (%)		Rata - Rata lama Disusui (bulan)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	89,68	94,07	10,43	10,62
Perempuan	97,12	90,25	11,74	9,04
Laki-laki + Perempuan	93,69	92,20	11,16	9,86

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Bila dilihat rata-rata lama bayi disusui pada tahun 2016 lebih singkat (9,86 bulan) dibanding tahun 2015 (11,16 bulan). Rata-rata lama bayi laki-laki disusui (10,62 bulan) lebih lama daripada bayi perempuan (9,04 bulan) pada tahun 2016.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.4 Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, Tahun 2015 – 2016

Jenis Imunisasi	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	95,04	98,86	98,64	93,48	96,82	96,41
DPT	98,76	94,08	98,67	89,92	98,72	92,18
Polio	97,61	96,72	100,00	97,59	98,79	97,12
Campak	77,79	79,21	81,25	78,65	79,50	78,96
Hepatitis B	97,50	92,42	98,69	91,07	98,09	91,81

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2015 dan 2016, mayoritas anak umur 12-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, balita yang mendapatkan imunisasi campak pada dua tahun terakhir masih di bawah 80 persen, yaitu 79,50 persen di tahun 2015 dan menurun menjadi 78,96 persen pada tahun 2016. Pada umumnya persentase anak umur 12-59 bulan yang telah mendapatkan imunisasi lengkap pada tahun 2016 (73,69 persen) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 (85,24 persen).

Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi BCG pada tahun 2015 sebesar 96,82 persen menurun menjadi sebesar 96,41 persen pada tahun 2016. Kemudian persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imuisasi DPT pada tahun 2015 sebesar 98,72 persen menurun menjadi sebesar 92,18 persen pada tahun 2016. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi Polio pada tahun 2015 sebesar 98,79 persen menurun menjadi sebesar 97,12 persen pada tahun 2016. Persentase anak umur 12-59 bulan yang pernah di imunisasi Hepatitis B pada tahun 2015 sebesar 98,09 persen juga menurun menjadi sebesar 91,81 persen pada tahun 2016.

2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Ponorogo telah mencapai 100 persen di tahun 2015 dan 2016. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mempercayakan penanganan persalinannya kepada tenaga kesehatan. Penolong persalinan yang dilakukan oleh bidan masih mendominasi walaupun mengalami penurunan selama tahun 2015-2016 dari 66,79 persen menjadi 60,86

persen. Di sisi lain penolong persalinan oleh dokter semakin meningkat persentasenya dari 33,21 persen pada tahun 2015 menjadi 39,14 persen di tahun 2016.

Tabel 2.5 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2015 – 2016

Penolong Persalinan	Tahun	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	100,00	100,00
- Dokter	33,21	39,14
- Bidan	66,79	60,86
- Lainnya	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
- Dukun Tradisional	0,00	0,00
- Lainnya	0,00	0,00

Sumber : Hasil Susenas 2014-2015

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke tenaga kesehatan. Terjadi peningkatan penduduk yang berobat ke praktek dokter atau klinik yaitu dari sebesar 30,49 persen pada tahun 2015 meningkat menjadi 32,07 persen di tahun 2016. Puskesmas merupakan alternatif kedua tempat berobat, pada tahun 2015 sebesar 16,36 persen menurun menjadi sebesar 12,57 persen (2016). Sebaliknya terjadi peningkatan penduduk yang memanfaatkan berobat ke rumah sakit dari 3,52 persen pada tahun 2015 menjadi 5,62 persen pada tahun 2016.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/

tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2015 – 2016

Tempat Berobat (1)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2015 (2)	2016 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2015 (6)	2016 (7)
Rumah Sakit	3,90	6,45	3,16	4,93	3,52	5,62
Praktek Dokter atau klinik	31,43	31,41	29,61	32,61	30,49	32,07
Puskesmas	15,76	11,20	16,92	13,72	16,36	12,57
Pengobatan Tradisional	1,44	1,11	3,20	0,85	2,35	0,97
Lainnya	1,28	2,64	2,03	3,59	1,67	3,16

Sumber : Hasil Susenas 2015-2016



3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Dan sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Ponorogo menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan tersebut akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan.

3.1 Angka Buta Huruf

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia limabelas (15) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana atau dapat membaca dan menulis huruf Braile.

Saat ini Kabupaten Ponorogo dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Kabupaten Ponorogo tahun 2016 mencapai 10,26 persen. Dari penduduk usia di atas 15 tahun, sekitar 10,26 persen belum bisa membaca dan menulis. Terbanyak adalah kelompok usia di atas 59 tahun, penduduk tua yang dahulu belum punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Daerah perkotaan mempunyai angka buta huruf (3,99 persen) jauh lebih kecil dibanding daerah perdesaan (12,99 persen). Sarana prasarana pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Ponorogo masih dirasakan kurang seimbang. Umumnya sarana dan prasarana pendidikan yang baik sebagian besar dijumpai di wilayah perkotaan.

Lebih lanjut pembahasan secara gender, angka buta huruf penduduk perempuan di Kabupaten Ponorogo lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka buta huruf penduduk perempuan tahun 2016 sebesar 13,78 persen, sedangkan angka buta huruf penduduk laki-laki sebesar 6,67 persen.

Tabel 3.1. Angka Buta Huruf Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo, 2016 (Persen)

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	0,00	0,00	0,00
20 - 24	0,00	0,00	0,00
25 - 29	0,00	0,00	0,00
30 - 34	0,00	0,00	0,00
35 - 39	2,60	0,00	1,18
40 - 44	1,19	0,69	0,91
45 - 49	0,00	3,64	1,72
50 - 54	2,02	5,76	4,14
55 - 59	7,51	13,23	10,02
60 - 64	21,97	36,49	28,94
65 +	30,22	57,42	45,51
Total	6,67	13,78	10,26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

Gambar 3.1. Angka Buta Huruf Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Ponorogo, 2016 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa angka buta huruf paling banyak berdomisili di wilayah perdesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan dan angka buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya dan lainnya.

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 mencapai 6,97 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 6,97 tahun atau setara dengan kelas VI tingkat SD. Tentunya capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya, bahkan capaian ini masih di bawah capaian Jawa Timur yang mencapai 7,23 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari 6,96 tahun pada 2015 menjadi 6,97 tahun pada 2016.

Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2016 (Tahun)



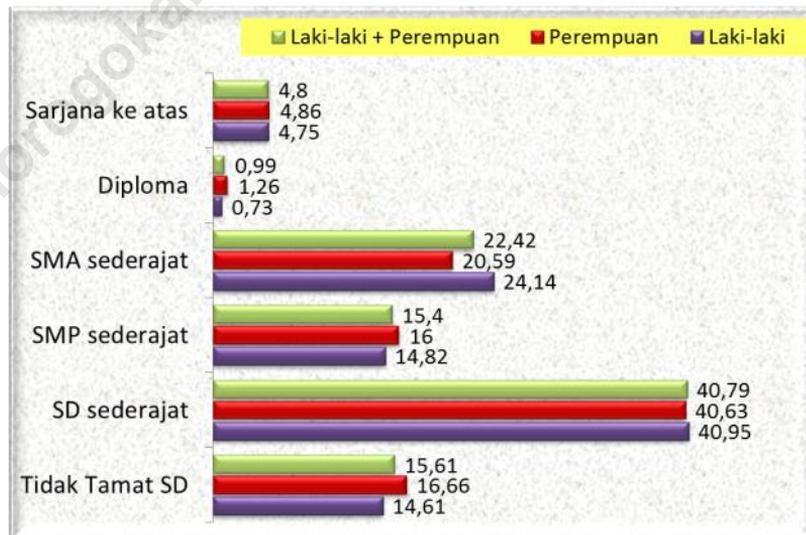
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

3.3 Tingkat Pendidikan

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kabupaten Ponorogo usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 15,61 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 40,79 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 15,40 persen. Dengan demikian, sebanyak 71,79 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan SMP ke bawah.

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat sekolah menengah atas (SMA) ke atas hanya 28,21 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajat sebesar 22,42 persen, sedangkan tamat diploma (D1/D3) dan tamat sarjana ke atas (S1/D4/S2/S3) masing-masing sebesar 0,99 persen dan 4,80 persen.

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

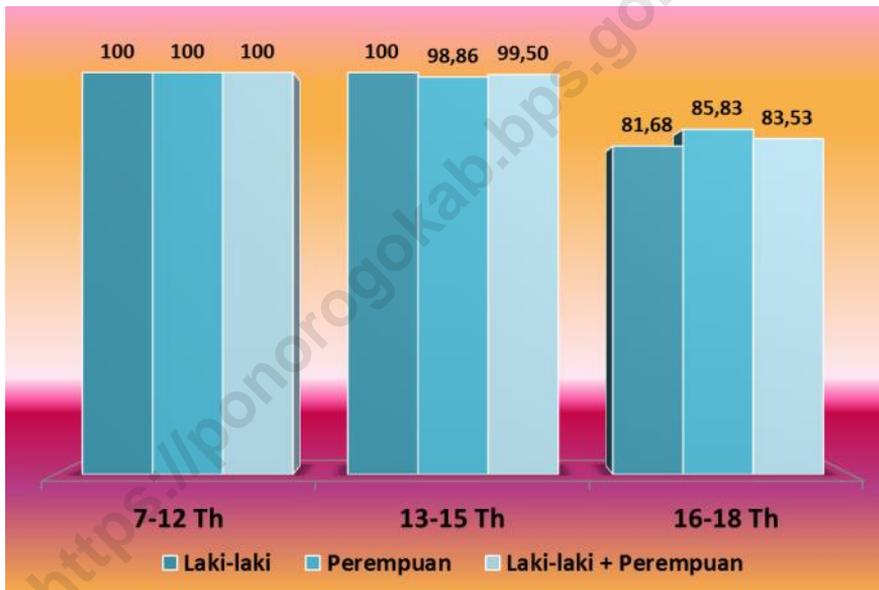
Yang menarik secara gender adalah persentase penduduk perempuan yang tamat tingkat perguruan tinggi (6,12 persen) ternyata lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (5,48 persen). Kondisi ini terjadi baik pada tingkat pendidikan Diploma maupun Sarjana ke atas.

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Ponorogo Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia, 2016



Sumber: Susenas, 2016

Secara umum, APS Kabupaten Ponorogo per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.4. APS kelompok usia 7-12 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebesar 100 yang berarti bahwa 100 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa) memandang tingkatan sekolahnya).

APS kelompok usia 13-15 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebesar 99,50 lebih rendah dari APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kabupaten Ponorogo pada usia 13-15 tahun 99,50 persen diantaranya memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebesar 83,53 persen. Angka ini lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 16 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 16-18 tahun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SMP.

Bila dicermati menurut gender, pada usia 7-12 tahun tidak ada perbedaan APS antara penduduk laki-laki dan perempuan yaitu mencapai 100. Namun pada usia 13-15 tahun, APS penduduk laki-laki (100) lebih tinggi dibandingkan APS penduduk perempuan (98,86). Namun pada usia 16-18 tahun terjadi sebaliknya yaitu APS penduduk perempuan (85,83) lebih tinggi daripada APS penduduk laki-laki (81,68).

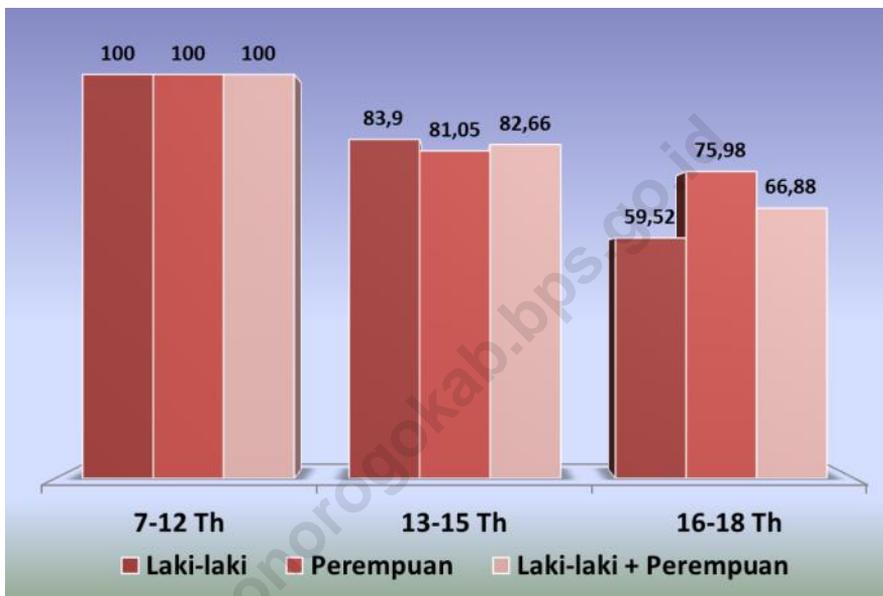
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Secara ringkas, APM dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$APM = \frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah yang sesuai}} \times 100\%$$

Secara umum APM menurut kelompok usia sekolah di Kabupaten Ponorogo ditunjukkan pada gambar 3.5. Penduduk usia 7-12 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Ponorogo tahun 2016 sebesar 100 atau sama dengan APS pada kelompok usia 7-12 tahun. Sementara itu, penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2016 sebanyak 82,66 persen.

APM kelompok usia 16-18 tahun di Kabupaten Ponorogo tahun 2016 hanya sebesar 66,88, terendah dibandingkan APM kelompok usia 7-12 tahun dan kelompok usia 13-15 tahun. APM kelompok usia 16-18 tahun sebesar 66,88 dapat diartikan penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2016 usia 16-18 tahun yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 66,88 persen.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah di Kabupaten Ponorogo, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016

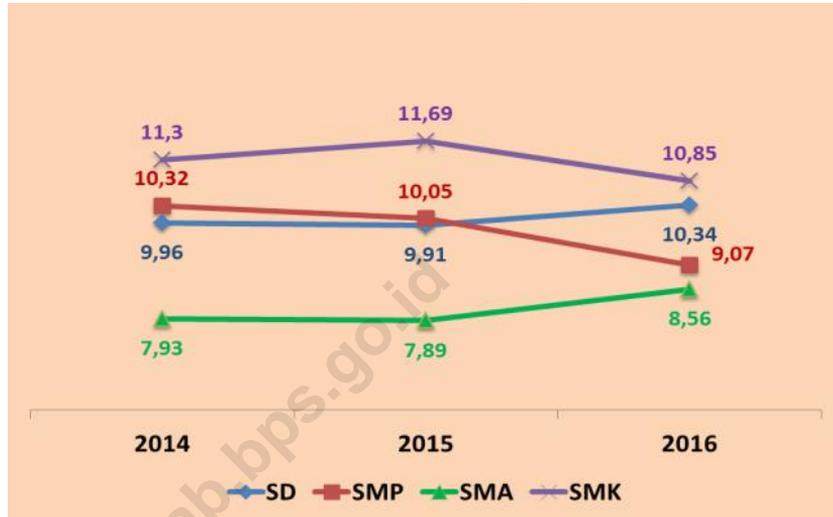
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid/guru, rasio guru/sekolah dan rasio murid/kelas. Rasio tersebut untuk melihat

seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Gambar 3.6 Rasio Murid– Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2016

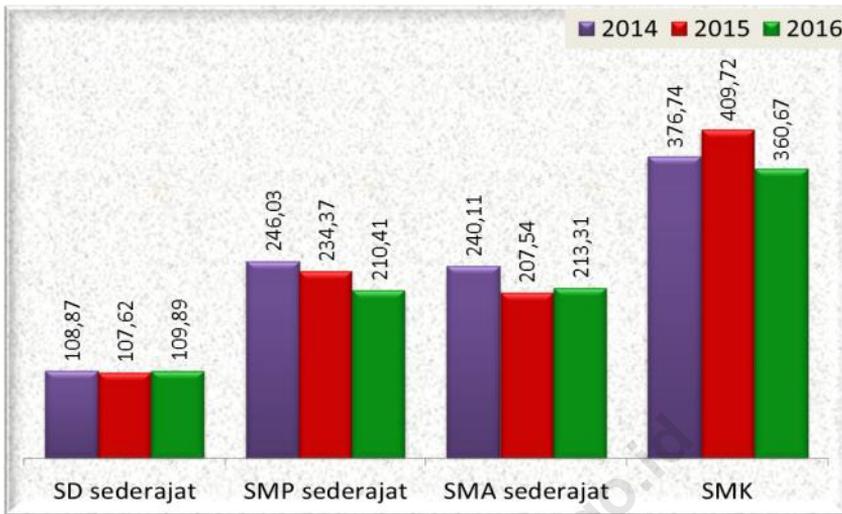


Sumber: Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, diolah

Rasio murid/guru pada jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMK di Kabupaten Ponorogo selama 3 tahun terakhir mengalami perbaikan. Hal tersebut tampak pada gambar 3.6. bahwa secara besaran angka rasio murid/guru semakin kecil. Sementara rasio murid/guru pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2016 semakin meningkat. Rasio murid/guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid/guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus.

Selain rasio murid/guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid/sekolah. Rasio murid/sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Ponorogo cenderung menurun kecuali pada jenjang SD sederajat.

Gambar 3.7. Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2014-2016



Sumber: Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, diolah

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Kabupaten Ponorogo. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) kondisi Agustus tahun 2013-2015. Indikator tenaga kerja tahun 2016 tidak dapat diulas karena sampel SAKERNAS di tahun tersebut tidak mencukupi untuk estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Indikator yang akan dianalisis antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/ pendapatan bersih.

Faktor penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh adanya kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja.

4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/ usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2015 sebesar 485,25 ribu orang, menurun sebanyak 11 ribu orang dibanding Agustus 2014. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan penurunan, dampaknya adalah penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo pada kurun waktu tersebut. Secara umum kondisi yang sama juga terjadi pada tingkat Jawa Timur.

Gambar 4.1
Jumlah Angkatan Kerja di
Kabupaten Ponorogo,
2011-2015 (Ribu Orang)



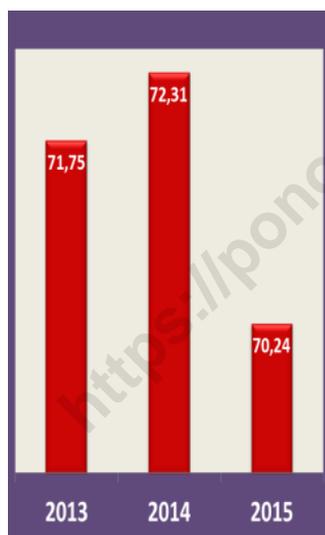
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus Tahun 2013 - 2015

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angkatan Kerja (AK)	<i>ribu orang</i>	481.685	496.443	485.245
Bekerja	<i>ribu orang</i>	465.871	478.260	467.372
Pengangguran	<i>ribu orang</i>	15.814	18.183	17.873
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,75	72,31	70,24
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,28	3,66	3,68

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Ponorogo, 2013-2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Menurunnya jumlah angkatan kerja berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo. Pada Agustus 2013, TPAK Kabupaten Ponorogo tercatat mencapai angka 71,75 persen. Sedangkan Agustus 2014 sebesar 72,31 persen dan pada Agustus 2015 turun menjadi 70,24 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 70,24 persen penduduk Kabupaten Ponorogo yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 29,76 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Pada bulan Agustus 2015 tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ponorogo sedikit meningkat dibanding Agustus 2014, dari 3,66 persen menjadi 3,68 persen.

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai pemicu antara lain penyebab bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

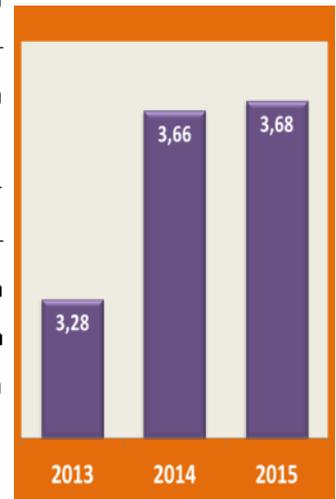
Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan pada penduduk perempuan namun menurun pada penduduk laki-laki. TPT penduduk perempuan pada tahun 2015 meningkat sebesar 0,70 persen dibanding tahun 2014 dari 2,44 persen menjadi 3,14 persen. Sebaliknya pada penduduk laki-laki TPT menurun 0,48 persen dari 4,55 persen di tahun 2014 menjadi 4,07 persen di tahun 2015. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Ponorogo meningkat tipis sebesar 0,02 persen dari 3,66 persen di tahun 2014 menjadi 3,68 persen di tahun 2015.

Peningkatan TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur semakin bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski TPT penduduk perempuan meningkat namun persentasenya masih lebih rendah dibandingkan TPT pada penduduk laki-laki. TPT Kabupaten Ponorogo tahun 2015 juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT Jawa Timur yang mencapai 4,47 persen.

4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan meningkatkan status pendidikan tinggi yang ditawarkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas ketrampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada

Gambar 4.3
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Kabupaten
Ponorogo, 2013-2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Akibatnya sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk tahun 2015 dengan pendidikan tidak tamat SD, tamat SD dan tamat SLTA umum mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 0,27 persen; 0,64 persen dan 0,17 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan TPT untuk jenjang pendidikan minimal SMA mengalami peningkatan di tahun 2015.

TPT tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMA Kejuruan baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh solusi permasalahan TPT di Kabupaten Ponorogo yang didorong oleh tingginya angka TPT penduduk dengan jenjang pendidikan tamatan SMU Kejuruan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas lulusan SMA kejuruan sehingga mempunyai daya saing kerja.

TPT untuk penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan Universitas juga mengalami peningkatan dari 0,15 persen pada tahun 2014 menjadi 0,48 persen di tahun 2015. Pada penduduk laki-laki, TPT lulusan universitas mengalami peningkatan sebesar 0,41 persen dari 0,26 persen di tahun 2014 menjadi 0,67 persen di tahun 2015. TPT penduduk perempuan yang berpendidikan universitas juga mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen di tahun 2015.

Lulusan pendidikan universitas lebih banyak yang terserap di lapangan pekerjaan wilayah perkotaan, dibandingkan dengan perdesaan. Sektor pertanian yang mendominasi lapangan pekerjaan di perdesaan tidak banyak menyerap penduduk lulusan pendidikan di jenjang ini, karena umumnya sektor pertanian tidak membutuhkan keahlian khusus.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2014-2015

Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki +Perempuan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum pernah	-	-	-	-	-	-
Tidak/belum tamat SD	-	-	0,64	-	0,27	-
SD	1,19	-	-	0,12	0,69	0,05
SLTP	1,17	1,30	0,21	0,59	0,76	1,01
SLTA Umum	0,75	0,68	1,27	0,97	0,97	0,80
SLTA Kejuruan	1,19	1,42	0,32	1,25	0,82	1,35
D I/II/III/IV	-	-	-	-	-	-
Universitas	0,26	0,67	-	0,21	0,15	0,48
Total	4,55	4,07	2,44	3,14	3,66	3,68
SMA +	2,20	2,77	1,59	2,43	1,94	2,63

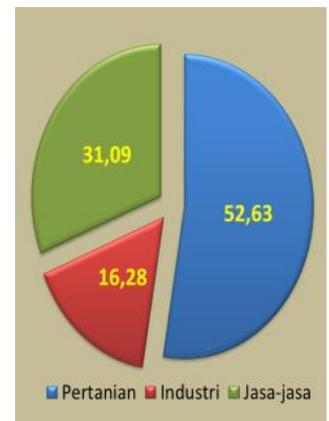
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (Pertanian, kehutanan dan perikanan), industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil SAKERNAS 2015, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor industri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dari 15,08 persen menjadi 16,28 persen. Penurunan terjadi di sektor pertanian sebesar 54,65 persen di tahun 2014 menjadi 52,63 persen di tahun 2015. Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor jasa. Penduduk yang bekerja di sektor ini secara umum meningkat 0,82 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, naik dari 30,27 persen di tahun 2014 menjadi 31,09 persen di tahun 2015.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

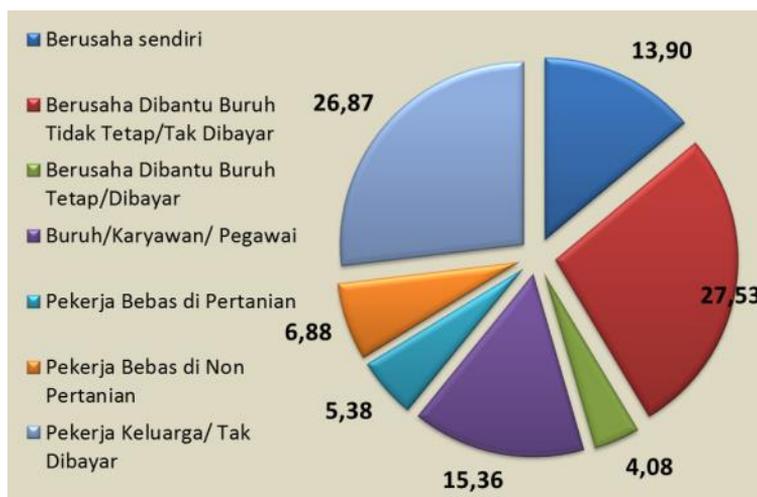
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, Tahun 2013-2015

Kelompok Usaha	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	241.507	261.383	245.991
Industri	61.146	72.121	76.083
Jasa-jasa	163.218	144.756	145.298
Total	465.871	478.260	467.372

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Jawa Timur

Namun secara keseluruhan, sektor pertanian tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2015. Komposisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Meski terlihat kecenderungan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa-jasa.

Gambar 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Status Usaha, 2015



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain yaitu mencapai 27,53 persen. Penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar adalah yang terbesar berikutnya dengan persentase mencapai 26,87 persen. Persentase terbesar selanjutnya adalah penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 15,36 persen. Sebaliknya penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar menempati komposisi terkecil dengan persentase hanya 4,08 persen.

4.5. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih

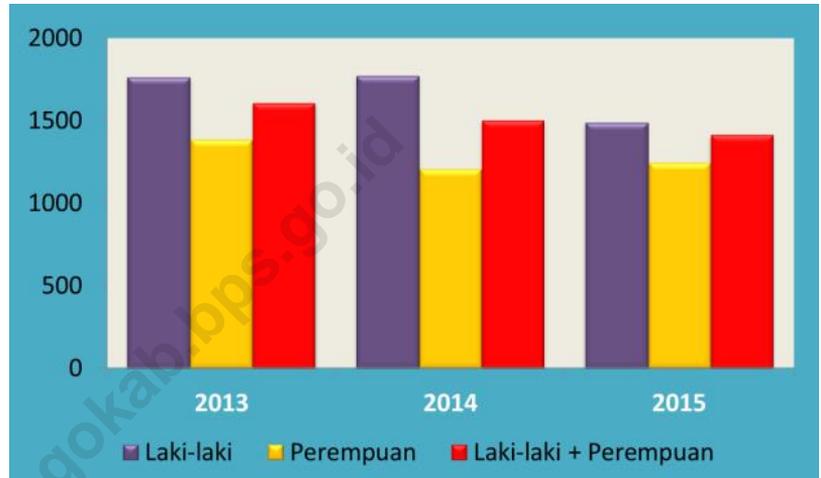
Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih penduduk yang bekerja sebulan secara umum terjadi penurunan sebesar 5,97 persen pada tahun 2015 dengan besaran gaji bersih dari 1,5 juta rupiah sebulan pada tahun 2014 menjadi 1,4 juta rupiah sebulan pada tahun 2015. Meningkatnya persentase penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian lebih tinggi dibandingkan status bekerja lainnya turut andil dalam penurunan rata-rata upah/gaji bersih penduduk tahun 2015. Biasanya rata-rata upah/gaji pada status pekerja bebas di pertanian relatif lebih rendah dibandingkan status berusaha dan status buruh/karyawan/pegawai, sehingga peningkatan jumlah pekerja bebas di pertanian akan membawa pengaruh terhadap menurunnya rata-rata upah/gaji bersih penduduk secara keseluruhan.

Bila dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan berdasarkan jenis kelamin terjadi kenaikan terutama untuk upah/gaji pekerja perempuan dalam kurun waktu 2014-2015.

Untuk pekerja perempuan rata-rata upah meningkat sebesar 3,10 persen dari 1,20 juta rupiah per bulan menjadi sebesar 1,24 juta rupiah per bulan di tahun 2015. Sementara rata-rata upah/gaji untuk pekerja laki-laki mengalami penurunan yaitu dari 1,77 juta rupiah di tahun 2014 menjadi 1,49 juta rupiah per bulan atau menurun sebesar 15,91 persen.

Gambar 4.6
Rata-rata Upah/Gaji Bersih (Rupiah) Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 – 2015
(Dalam Ribuan Rupiah)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur



5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya, secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan kedalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Kabupaten Ponorogo mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2015 -2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

**Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran,
Tahun 2015-2016**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	290.569	291.719	45,46	46,71
Bukan Makanan	348.584	332.807	54,54	53,29
- Perumahan	150.645	149.776	23,57	23,98
- Barang dan Jasa	75.068	74.487	11,74	11,93
- Pakaian	15.895	14.177	2,49	2,27
- Barang Tahan Lama	80.508	67.990	12,60	10,89
- Lainnya	26.468	26.377	4,14	4,22
Jumlah	639.153	624.526	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Data Susenas 2015-2016 diolah

Gambaran konsumsi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2015-2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk menurun dari Rp 639.153,- menjadi Rp 624.526,-. Dimana pada tahun 2015 sekitar Rp. 290.596,- atau 45,46 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan, sedangkan Rp. 348.584,- atau 54,54 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2016 sekitar Rp. 291.719,- atau 46,71 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan Rp. 332.807,- atau 53,29 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan justru mengalami sedikit peningkatan dan sebaliknya pengeluaran bukan makanan justru menurun. Peningkatan persentase pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada semua jenis pengeluaran, kecuali pengeluaran untuk pakaian dan barang tahan lama yang menurun dari masing-masing 2,49 persen dan 12,60 persen pada tahun 2015 menjadi 2,27 persen dan 10,89 persen pada tahun 2016.

Sementara itu, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu 291.719 rupiah per kapita sebulan dibanding tahun sebelumnya sebesar 290.569 rupiah per kapita sebulan, atau naik sebesar 0,40 persen. Kenaikan ini terbanyak terjadi pada golongan pengeluaran per kapita 150.000 hingga 199.999 rupiah sebesar 12,24 persen dan golongan pengeluaran 750.000 hingga 999.999 rupiah sebesar 6,34 persen. Sementara itu golongan pengeluaran 300.000 hingga 499.999 rupiah mengalami penurunan konsumsi makanan sebesar 2,50 persen.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Jenis Pengeluaran (Rupiah), Tahun 2015 -2016

Golongan Pengeluaran per Kapita (1)	Makanan		Non Makanan		Total	
	2015 (2)	2016 (3)	2015 (4)	2016 (5)	2015 (6)	2016 (7)
< 100 000	-	-	-	-	-	-
100 000 - 149 999	-	-	-	-	-	-
150 000 - 199 999	109.707	123.130	77.273	60.877	186.980	184.007
200 000 - 299 999	155.640	160.891	101.772	100.765	257.412	261.656
300 000 - 499 999	230.526	224.762	139.402	162.627	369.928	387.389
500 000 - 749 999	304.421	315.922	320.730	285.849	625.152	601.771
750 000 - 999 999	403.701	429.297	450.804	453.901	854.505	883.198
> 1 000 000	553.015	555.384	1.191.414	1.131.548	1.774.429	1.686.932
Rata-rata per Kapita	290.569	291.719	348.854	332.807	639.153	624.526

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Data Susenas 2015-2016 diolah

Berbeda dengan pengeluaran untuk makanan, pengeluaran untuk bukan makanan justru mengalami penurunan yaitu dari Rp. 348.854,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 332.807,- pada tahun 2016 atau turun sebesar 4,60 persen. Penurunan terjadi hampir di semua golongan pengeluaran per kapita sebulan kecuali pada golongan pengeluaran 300.000 hingga 499.999 rupiah dan golongan pengeluaran 750.000 hingga 999.999 rupiah. Penurunan tertinggi pada golongan pengeluaran 150.000 hingga 199.999 rupiah yaitu sebesar 21,22 persen dan golongan pengeluaran 500.000 hingga 749.999 rupiah sebesar 10,88 persen.

Kondisi masyarakat tidak hanya berbeda dalam hal besarnya pengeluaran, tetapi juga berbeda dalam hal pola konsumsi. Hal ini dikarenakan perbedaan pada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh oleh berbagai lapisan masyarakat. Perbedaan ini bisa menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada ketimpangan tingkat kemakmuran antara masyarakat. Ketimpangan tingkat kemakmuran antar lapisan masyarakat ini dapat diukur dengan pendekatan pendapatan maupun dengan pendekatan pengeluaran. Data pendapatan yang sulit diperoleh karena sulitnya mendapatkan pengakuan dari responden, menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Tabel 5.3 Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, Tahun 2014-2016

Tahun	40 % Terendah	40 % Menengah	20 % Tertinggi	Indeks Gini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	21,06	35,01	43,93	0,31
2015	17,62	35,35	47,04	0,36
2016	19,27	34,02	46,71	0,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Data Susenas 2014-2016 diolah

Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat bahwa distribusi pendapatan yang didekati dengan distribusi pengeluaran pada kelas 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah selama periode 2014 hingga 2016 cenderung fluktuatif, yaitu dari 21,06 persen di tahun 2014 turun menjadi 17,62 persen pada tahun 2015 kemudian naik lagi pada tahun 2016 menjadi 19,27 persen. Menurut kriteria Bank Dunia, keadaan ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan di Kabupaten Ponorogo berada pada level rendah. Meskipun pada kategori ketimpangan rendah, pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi terjadi peningkatan persentase dari 43,93 persen di tahun 2014 menjadi 47,04 persen pada tahun 2015, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 46,71 persen.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- * Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan dianggap tinggi.
- * Memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan dianggap sedang
- * Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan dianggap rendah

Sementara Indeks Gini sejak tahun 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 0,31 di tahun 2014, meningkat menjadi 0,36 di tahun 2015 dan tetap stabil pada angka 0,36 di tahun 2016. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan antar kelompok pengeluaran cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

5.2. Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi energi dan protein. Jumlah konsumsi energi dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kilo kalori dan 57 gram protein per hari.

Selama periode 2015-2016 penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan konsumsi energi/kalori per hari sebesar 79,84 kkal. Pada tahun 2015 penduduk Kabupaten Ponorogo mampu mengkonsumsi energi/kalori rata-rata per hari sebesar 1.986,77 kkal dan tahun 2016 menjadi 1.906,93 kkal, sedikit lebih rendah dari tahun 2015. Ini berarti konsumsi energi per hari penduduk Kabupaten Ponorogo di tahun 2016 masih belum memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu sebesar 2.150 kkal. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita per hari penduduk Kabupaten Ponorogo juga masih relatif kecil, yaitu dari 51,17 gram pada tahun 2015 dan sedikit menurun 0,40 gram menjadi 50,77 gram pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya kecukupan protein yang disyaratkan yaitu 57 gram.

Rata-rata konsumsi energi menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa penduduk di perkotaan selama kurun waktu 2015-2016 menurun, yaitu 2.023,53 pada tahun 2015 dan turun menjadi 1.975,45 pada tahun 2016. Konsumsi energi di daerah perdesaan tahun 2015 lebih rendah dari konsumsi energi di perkotaan yaitu sebesar 1.972,58 kkal, demikian juga pada tahun 2016 lebih rendah di daerah perdesaan yaitu 1.878,98 kkal.

Tabel 5.4
Rata-rata Konsumsi Energi (kkal) dan Protein (gram) per Kapita
Sehari Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2015 - 2016

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)			
2015	2.023,53	1.972,58	1.986,77
2016	1.975,45	1.878,98	1.906,93
Protein (gram)			
2015	54,89	49,73	51,17
2016	54,12	49,41	50,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Data Susenas 2015-2016 diolah

Sedangkan konsumsi protein penduduk di perkotaan juga lebih tinggi jika dibandingkan penduduk di daerah perdesaan. Pada tahun 2015 rata-rata konsumsi protein penduduk perkotaan sebanyak 54,89 gram, kemudian sedikit menurun menjadi 54,12 gram pada tahun 2016. Sedangkan penduduk perdesaan rata-rata hanya mengkonsumsi protein sebanyak 49,73 gram pada tahun 2015 dan menurun 0,32 gram menjadi 49,41 gram pada tahun 2016. Kecukupan konsumsi energi dan protein bagi penduduk perkotaan maupun penduduk perdesaan masih kurang dari rata-rata kecukupan energi dan protein yang dianjurkan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan di Kabupaten Ponorogo masih belum memperhatikan akan kebutuhan asupan energi dan protein yang dibutuhkan bagi anggota keluarganya dan kesehatan tubuh.



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikannya kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Susenas 2016, persentase rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016, rumah yang berlantaikan bukan tanah meningkat menjadi sebesar 87,39 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 85,97 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, pada daerah perdesaan rumah tangga yang rumahnya berlantaikan tanah masih lebih besar dibandingkan perkotaan yaitu 14,51 persen pada daerah perdesaan dan 8,12 persen di daerah perkotaan.

Tabel 6.1. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2015 dan 2016

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai bukan tanah (%)	97,83	91,88	81,14	85,49	85,97	87,39
Atap beton, genteng, sirap dan asbes (%)	99,14	99,68	99,81	100,00	99,62	99,90
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	98,92	99,30	89,80	91,77	92,44	94,01
Rata-rata luas lantai per kapita (m ²)	38,80	41,36	35,24	34,40	36,27	36,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Pada tahun 2015 rumah tempat tinggal dengan atap beton, genteng, sirap dan asbes di Kabupaten Ponorogo sebesar 99,62 persen dan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 99,90 persen. Sementara jika dilihat menurut daerah tempat tinggal maka kualitas rumah pada tahun 2016 di daerah perkotaan yang beratap layak telah mencapai 99,68 persen dan di perdesaan mencapai 100,00 persen.

Pada tahun 2016 kualitas perumahan di Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari indikator dinding terluas tembok dan kayu telah meningkat menjadi sebesar 94,01 persen dibanding tahun 2015 yang sebesar 92,44 persen. Kualitas rumah yang baik di daerah perkotaan pada tahun 2016 dilihat dari dinding terluas dari tembok dan kayu sebesar 99,30 persen, sementara di perdesaan masih sebesar 91,77 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan Kategori rumah sehat (menurut Kemenkes, 2005), adalah rumah yang memiliki luas lantai minimum 8 m² perkapita, mempunyai kualitas bangunan yang baik, berada dalam lingkungan yang bersih dan bebas dari polusi, serta memiliki penataan ventilasi yang cukup untuk keluar masuknya udara dan sinar matahari.

Berdasarkan hasil Susenas 2016, rata-rata luas lantai per kapita di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 36,46 m² dibanding tahun 2015 yang sebesar 36,27 m², dimana justru rata-rata luas lantai per kapita di perdesaan lebih kecil dibanding di perkotaan yaitu sebesar 34,40 m², sementara di perkotaan rata-rata luas lantai per kapita mencapai 41,36 m². Rata-rata luas lantai per kapita di perkotaan sendiri sudah meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 38,80 m².

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2016, rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 96,58 persen. Penggunaan air minum bersih di daerah perkotaan sudah mencapai 98,10 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 95,94 persen. Gaya hidup penduduk perkotaan dalam mengkonsumsi air berbeda dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di perdesaan. Hal ini terlihat dari rumah tangga di daerah perkotaan dalam mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air dari ledeng yang mencapai 40,43 persen, sementara di perdesaan hanya 10,89 persen.

Tabel 6.2. Persentase rumahtangga menurut beberapa fasilitas perumahan, 2015 dan 2016

Indikator Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	34,92	40,43	11,16	10,89	18,04	19,65
Air minum bersih	100,00	98,10	90,90	95,94	93,54	96,58
Jamban sendiri	86,40	85,50	76,14	75,81	79,11	78,69
Jamban sendiri dengan tangki septik	64,23	96,25	50,82	75,79	55,06	82,39
Sumber penerangan listrik	100,00	99,56	100,00	99,77	100,00	99,71

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik sudah mencapai 82,39 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 (55,06 persen).

Selain itu sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2016 sebanyak 99,71 persen. Di daerah perkotaan rumahtangga yang menggunakan sumber penerangan listrik sebanyak 99,56 persen dan di daerah perdesaan sebanyak 99,71 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil Susenas 2016 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 94,46 persen dan sisanya sebesar 5,54 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 0,72 persen, bebas sewa sebesar 4,49 persen, rumah dinas dan lainnya masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,14 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2015 yang sebesar 94,90 persen. Peningkatan justru terjadi pada status kepemilikan bebas sewa yang naik 0,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh penambahan rumah tangga baru yang belum memiliki rumah sendiri dan masih bergabung dengan rumah tangga orang tua/saudara.

Menurut daerah tempat tinggal, kepemilikan rumah tinggal milik sendiri di perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan yaitu 89,03 persen di perkotaan dan 96,75 persen di perdesaan. Hal ini diduga karena harga jual rumah di daerah perkotaan lebih mahal daripada di perdesaan sehingga banyak penduduk yang mengontrak/sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2015 dan 2016

Indikator Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri	89,69	89,03	97,02	96,75	94,90	94,46
Kontrak/sewa	4,94	1,91	-	0,22	1,43	0,72
Bebas Sewa	5,37	8,45	2,83	2,83	3,56	4,49
Rumah Dinas	-	0,60	0,15	-	0,11	0,18
Lainnya	-	-	-	0,20	-	0,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Jokowi-JK juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam misinya, *Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

Tabel 7.1
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo,
2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(5)
2012	101,10	11,76
2013	102,60	11,92
2014	99,86	11,53
2015	103,22	11,91
2016	102,06	11,75

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tahun 2012-2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo cenderung fluktuatif meskipun banyak program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada tahun 2012 penduduk miskin Kabupaten Ponorogo sebesar 11,76 persen, kemudian naik menjadi 11,92 persen tahun 2013. Namun angka menurun pada tahun 2014 sehingga penduduk miskin Kabupaten Ponorogo mencapai 11,53 persen, tetapi meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 11,91 persen dan turun menjadi 11,75 persen pada 2016.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan persentase penduduk miskin ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak pada pertengahan tahun 2013 yang menyebabkan inflasi tahun 2013 mencapai 7,52 persen.

Gambar 7.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ponorogo,
2012-2016 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan antar waktu selama 2012-2016. Pada tahun 2012 garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 224.186 per kapita per bulan dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 266.312 per kapita per bulan pada tahun 2016.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P_1 , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mencapai 1,69 pada tahun 2012 kemudian menurun 0,02 poin menjadi 1,67 pada tahun 2013. P_1 kembali turun pada periode 2014 menjadi 1,54, tetapi pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 1,63. Kenaikan P_1 ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan kata lain penduduk Kabupaten Ponorogo mengalami kemiskinan yang semakin dalam. Namun pada tahun 2016 P_1 menunjukkan penurunan hingga menjadi 1,47. Hal ini mencerminkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2016 kembali mendekati garis kemiskinan, atau tingkat kedalamannya berkurang dibandingkan tahun 2015.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kabupaten Ponorogo memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) antar waktu. Pada tahun 2012 P_2 Kabupaten Ponorogo sebesar 0,38 dan sedikit menurun 0,02 poin pada tahun 2013 menjadi 0,36. Pada tahun 2014 P_2 terus menurun menjadi 0,30. Sedangkan pada tahun 2015 P_2 kembali meningkat menjadi 0,33 dan kembali turun pada tahun 2016 menjadi 0,28. Nilai P_2 yang cenderung meningkat ini menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar. Sebaliknya nilai P_2 yang cenderung menurun menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Ponorogo, 2012-2016

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	224.186	1,69	0,38
2013	239.963	1,67	0,36
2014	247.368	1,54	0,30
2015	251.525	1,63	0,33
2016	266.312	1,47	0,28

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur



8. SOSIAL LAINNYA

8.1. Persentase Penduduk yang Melakukan Perjalanan

Melakukan perjalanan adalah bagian kebutuhan dasar manusia. Perjalanan dilakukan selain untuk aktivitas pekerjaan, juga untuk mencukupi kebutuhan rohani. Pada tahun 2016 penduduk Kabupaten Ponorogo selama enam bulan terakhir yang melakukan perjalanan sebesar 18,3 persen. Bila diperhatikan menurut gender, ternyata penduduk laki-laki yang lebih banyak melakukan perjalanan yaitu 20 persen, sementara penduduk perempuan yang melakukan perjalanan hanya 16,60 persen.

Gambar 8.1 Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo yang Melakukan Perjalanan 2016



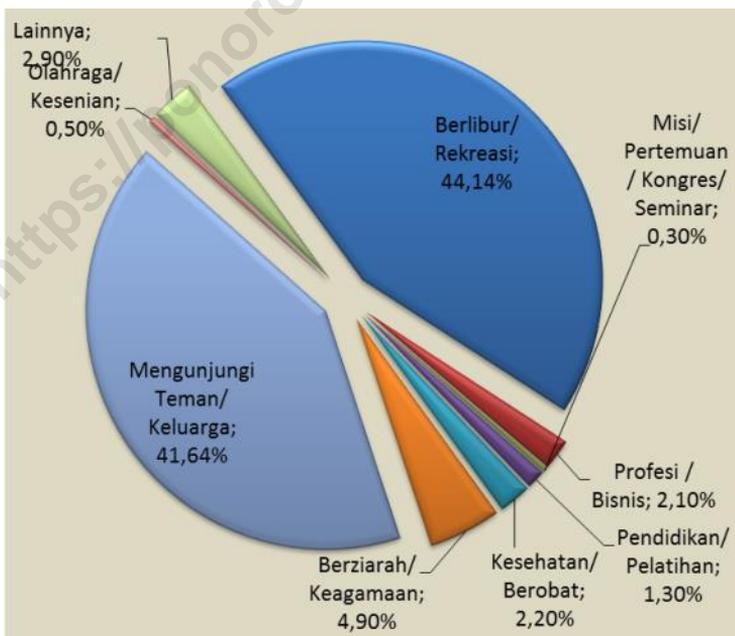
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berbagai tujuan dilakukan penduduk Kabupaten Ponorogo dalam melakukan perjalanan. Tujuan perjalanan yang sebagian besar dilakukan oleh penduduk Kabupaten Ponorogo adalah untuk rekreasi (44,1 persen) dan mengunjungi teman/keluarga (41,6 persen).

Untuk menghilangkan kepenatan dalam mengerjakan rutinas sehari-hari, banyak orang memilih rekreasi. Di Kabupaten Ponorogo sendiri, terdapat banyak tempat hiburan untuk rekreasi seperti wisata alam telaga, hutan lindung, taman hiburan, dan tempat bermain. Selain itu posisi Kabupaten Ponorogo yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah memberi banyak peluang bagi penduduknya untuk mengunjungi tempat wisata di luar provinsi. Sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik sangat mendukung kemudahan masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat rekreasi baik di dalam maupun luar wilayah Kabupaten Ponorogo.

Perjalanan terbanyak kedua dimanfaatkan untuk mengunjungi teman/keluarga. Penduduk Kabupaten Ponorogo mayoritas muslim mempunyai budaya pulang kampung pada hari raya Idul Fitri. *Peak season* penduduk yang melakukan perjalanan terjadi antara H-7 hingga H+7 hari raya. Perekonomian berjalan cukup cepat pada momen musiman itu di seluruh sektor ekonomi. Fenomena tersebut menjelaskan mengapa persentase penduduk yang melakukan perjalanan terbanyak dengan tujuan mengunjungi keluarga/teman.

Gambar 8.2 Persentase Tujuan Utama Penduduk Kabupaten Ponorogo Melakukan Perjalanan, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Susenas 2016, penduduk Kabupaten Ponorogo yang melakukan perjalanan dalam rangka tujuan keagamaan atau ziarah pada tahun 2016 tercatat sebanyak 4,9 persen, merupakan tujuan perjalanan ketiga terbanyak. Angka itu termasuk penduduk Kabupaten Ponorogo yang melakukan ziarah baik di dalam provinsi maupun di luar provinsi Jawa Timur.

Tujuan utama lainnya seperti bepergian untuk bisnis, pendidikan, kesehatan dan sebagainya kurang dari 5 persen. Sedangkan tujuan terendah perjalanan tercatat pada tujuan utama untuk Misi/Pertemuan atau sebesar 0,3 persen.

8.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Menurut kegiatannya, penduduk usia 10 tahun ke atas dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu penduduk yang bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk Kabupaten Ponorogo usia 10 tahun ke atas yang kegiatan seminggu terakhir bekerja tercatat sebanyak 61,6 persen. Bekerja yang dimaksud disini adalah melakukan kegiatan bekerja minimal satu jam yang menghasilkan nilai ekonomis dalam seminggu terakhir baik sebagai pengusaha, pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga).

Gambar 8.3 Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Kegiatan, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Distribusi penduduk yang terbesar adalah yang melakukan kegiatan lainnya, seperti penduduk yang tidak melakukan kegiatan apapun, punya pekerjaan tetapi untuk sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya sebanyak 70,9 persen.

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan bekerja tercatat terbanyak kedua setelah kegiatan lainnya yang mencapai 61,6 persen. Terbanyak ketiga adalah penduduk yang mengurus rumah tangga atau sebesar 59,7 persen. Sebagian besar yang mengurus rumah tangga adalah ibu rumah tangga dan penduduk lansia (lanjut usia).

Sisanya adalah penduduk yang melakukan kegiatan sekolah. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah sebesar 17,1 persen. Bersekolah yang dimaksud adalah menjalani pendidikan setingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.

Pembagian kelompok penduduk tersebut berbeda menurut definisi ketenagakerjaan. Perbedaan terletak pada pembatasan usia penduduk. Jika dilihat menurut ketenagakerjaan, diukur dari penduduk yang bekerja dan melakukan aktivitas lainnya dengan usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan definisi ketenagakerjaan, pada tahun 2015 tingkat partisipasi angkatan kerja (terdiri dari penduduk yang bekerja dan penganggur) sebesar 70,24 persen, sedangkan sisanya sebesar 29,76 persen melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

8.3. Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Di abad milenial ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *hand phone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Susenas terakhir. Rumah tangga yang mempunyai telepon di rumah pada tahun 2016 tercatat hanya 1,8 persen. Kondisi ini berbeda jauh dengan jumlah penduduk yang mempunyai HP yang mencapai 56,8 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan komunikasi selular, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat.

Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat BBM, facebook, whatsapp, Line dan lain sebagainya yang tidak kesemuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Gambar 8.4 Persentase Penduduk yang Menguasai/Memiliki atau Menggunakan Alat Komunikasi dan Informasi dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya tower signal di daerah tersebut.

Sementara penduduk Kabupaten Ponorogo yang menggunakan alat informasi berupa komputer atau laptop dalam tiga bulan terakhir tercatat sebesar 14,6 persen. Persentase ini diduga semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Ponorogo.

8.4. Persentase Penduduk Penerima Kredit Usaha dan Jaminan Sosial

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari pemerintah dan swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait kredit usaha rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Sosialisasi KUR juga dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang anggota rumah tangganya ada yang menerima kredit usaha pada tahun 2016 terbanyak dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 7,1 persen, diikuti program koperasi sebesar 6,9 persen. Selanjutnya adalah program bank selain KUR (6,4 persen) dan lainnya (3,6 persen).

Di beberapa daerah khususnya perdesaan, usaha koperasi lebih menonjol dibanding perusahaan pembiayaan lainnya. Meskipun pada umumnya perusahaan pembiayaan di daerah sebagian besar adalah bank, koperasi tetap menjadi pilihan favorit masyarakat perdesaan. Bagi masyarakat perdesaan, prosedur pengajuan kredit melalui bank dianggap cukup rumit sehingga ada rasa takut untuk memanfaatkan kredit usaha.

Kondisi itu berbeda dengan prosedur pengambilan kredit melalui koperasi yang dianggap lebih ringkas dan jangkauannya hingga ke pelosok daerah. Selain bisa memanfaatkan sebagai tempat pemberian kredit, melalui koperasi juga bisa dimanfaatkan sebagai media pemasaran hasil produksi usaha.

Gambar 8.5 Persentase Rumah Tangga Yang Anggotanya Menerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Ponorogo 2016

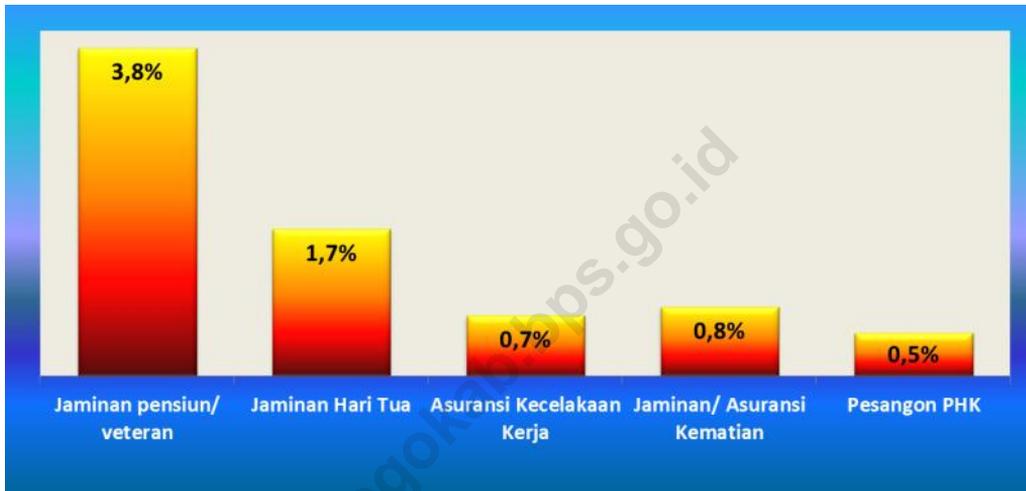


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dua jenis kredit usaha yang juga digunakan penerima kredit usaha adalah PNPB dan Perseorangan (dengan bunga) masing-masing 2,1 persen dan 0,6 persen. Bagi wilayah yang tidak tersedia lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi.

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ponorogo juga melalui pemberian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaraanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO no. 102 tahun 1952.

Gambar 8.6 Persentase Rumah Tangga yang Ada Anggotanya Memiliki / Menerima Jaminan Sosial Dalam Setahun Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang ada anggota rumah tangganya memiliki/menerima jaminan sosial dalam setahun terakhir tahun 2016 sebanyak 3,8 persen. Jenis kepemilikan jaminan sosial yang terbanyak adalah jaminan pensiun / veteran sebesar 3,8 persen dan jaminan hari tua sebesar 1,7 persen. Lainnya adalah jaminan/asuransi kematian sebesar 0,8 persen, asuransi kecelakaan kerja sebesar 0,7 persen, dan pesangon PHK sebesar 0,5 persen.

Sementara persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun 2016 di Kabupaten Ponorogo mencapai 17,6 persen dengan rincian 13,1 persen dapat menunjukkan kartu dan sisanya 4,5 persen mengaku menerima kartu tersebut namun tidak dapat menunjukkannya.

8.5. Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan

Kenyamanan individu dari kejahatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan rakyat. Semakin sejahtera suatu wilayah, semakin aman masyarakatnya dari tindak kejahatan. Hak atas rasa aman merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Hak atas rasa aman tidak hanya dalam pengertian fisiologis maupun psikologis, tetapi juga hak atas keamanan harta benda.

Gambar 8.7 Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2016 tercatat penduduk Kabupaten Ponorogo yang mengalami tindak kejahatan kurang dari 1 persen. Kejahatan yang dimaksud meliputi pencurian, penganiayaan, perampokan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya.

Korban kejahatan terbanyak menurut hasil Susenas 2016 adalah pada kejahatan pencurian sebesar 0,84 persen. Untuk jenis kejahatan penganiayaan, pencurian dengan kekerasan dan pelecehan seksual persentasenya sangat kecil pada tahun 2016. Sementara korban kejahatan lainnya sebesar 0,04 persen. Optimalisasi kerjasama antara masyarakat, Pemerintah dan Kepolisian sangat diharapkan agar kasus kejahatan di Kabupaten Ponorogo bisa ditekan sekecil mungkin.

Gambar 8.8. Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2016



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://ponorogokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 14 Ponorogo

Telp/Fax : 0352-481026 E-mail : bps3502@bps.go.id Homepage : <http://ponorogokab.bps.go.id>